



## **Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Modal Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2019-2024: Pendekatan *Data Envelopment Analysis* (DEA)**

**Firda Divani Risdianti<sup>1\*</sup>, Khoirunnisa Cahya Firdarini<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> STIE Widya Wiwaha Yogyakarta

\*E-mail: [divanyfirda022@gmail.com](mailto:divanyfirda022@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menilai efisiensi realisasi anggaran belanja modal pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul selama periode 2019-2024 dengan mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19 serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Analisis ini dilakukan melalui pendekatan *Data Envelopment Analysis* (DEA) model Charnes, Cooper, dan Rhodes (CCR). Variabel input meliputi alokasi belanja modal, realisasi belanja modal, dan jumlah kegiatan fisik wisata, sedangkan variabel output berupa PAD sektor pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan efisiensi anggaran tercapai pada tahun 2019, 2022, dan 2023, sementara tahun tidak efisien terjadi pada 2020, 2021 dan 2024. terjadinya penurunan tingkat efisiensi pada masa pandemi akibat terhambatnya pelaksanaan kegiatan fisik yang tidak sebanding dengan alokasi dan realisasi anggaran. Pada periode pasca pandemi, efisiensi mulai meningkat seiring perbaikan perencanaan anggaran dan optimalisasi skala kegiatan prioritas. Penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan anggaran yang selaras antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran berperan penting dalam meningkatkan kinerja belanja modal sektor pariwisata daerah.

**Kata Kunci :** Efisiensi anggaran, Belanja modal, *Data Envelopment Analysis*, Pariwisata Daerah, Pendapatan Asli Daerah

### **PENDAHULUAN**

Sektor pariwisata memberikan peran yang krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten ini memiliki potensi wisata yang kaya dan beragam, meliputi wisata alam pantai salah satunya Pantai Parangtritis, wisata budaya, agrowisata dan kuliner, yang memerlukan dukungan pengelolaan belanja modal secara efektif, khususnya pada pengembangan infrastruktur dan daya tarik wisata, guna meningkatkan kunjungan wisatawan serta Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Belanja modal merupakan pengeluaran untuk memperoleh aset tetap berwujud yang memberikan manfaat jangka panjang, dengan pengelolaan yang mengikuti prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan dan kepatuhan sesuai peraturan perundang-undangan (Laoli et al, 2022). Namun realisasi belanja modal sering mengalami kendala seperti perubahan kebijakan, keterbatasan sumber daya

## Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Modal Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2019-2024 Menggunakan Metode *Data Envelopment Analysis* (DEA)

manusia, dan alokasi anggaran yang tidak optimal. Pandemi Covid-19 memperburuk situasi ini hingga menimbulkan ketidakstabilan fiskal dan menurunkan kinerja sektor pariwisata di berbagai daerah (Desdiani, 2022).

Kabupaten Bantul, sektor pariwisata mengalami penurunan tajam akibat pandemi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pariwisata mencapai Rp 31 miliar pada 2019, namun turun drastis menjadi Rp 16 miliar pada 2020 dan Rp 13,38 miliar pada 2021 (data.bantulkab.go.id, diakses 25 September 2025). Pada pemulihan pasca pandemi kunjungan wisatawan mencapai lebih dari 2,7 juta orang pada tahun 2022, dan terjadi peningkatan pada tahun 2024 sekitar 2,37 juta dengan kontribusi PAD sekitar Rp 30,6 miliar. Meskipun demikian, tren peningkatan dan capaian belum sepenuhnya mencerminkan potensi optimal wisata daerah, sehingga diperlukan evaluasi efisiensi pengelolaan belanja modal.

Efisiensi realisasi anggaran belanja modal pada dinas pariwisata kabupaten Bantul perlu diukur dan dievaluasi dengan metode yang mampu menilai secara objektif untuk melihat nilai input dan output dari variabel yang dihasilkan. Metode rasio efektivitas umum digunakan untuk menilai realisasi anggaran secara sederhana untuk membandingkan target dan capaian (Halim, 2016; Mahmudi, 2019). Metode ini bersifat statis yang terbatas dalam satu periode dan tidak mempertimbangkan keterkaitan variabel input dan output secara komprehensif. Oleh karena itu, metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) dengan model Charnes, Cooper, Rhodes (CCR) lebih efektif, karena dapat mengukur efisiensi relatif secara objektif melalui multiple input dan output, serta membandingkan kinerja antar periode dengan *asumsi constant returns to scale*. Model CCR berasumsi skala tetap, artinya setiap penambahan atau pengurangan sumber daya (input) diasumsikan menghasilkan peningkatan atau penurunan hasil (output) dalam proporsi yang sama. Penelitian terdahulu, seperti Vina et al (2023) pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, menggunakan rasio efektivitas dan efisiensi, tetapi bersifat satu dimensi dan periodik. Keterbatasan ini mendorong penggunaan DEA untuk analisis efisiensi yang mendalam dan komparatif.

Kabupaten Bantul dipilih sebagai objek penelitian ini karena memiliki potensi pariwisata yang lebih variatif dibandingkan kabupaten lain yang ada di DIY, dengan wisata alam mendominasi sekitar 62,5% dari total objek wisata (sekitar 75 objek, termasuk Pantai, goa dan gumuk pasir) serta wisata buatan 37,5% (Bappeda Kabupaten Bantul, 2024 diakses 22 September 2025). Periode 2019-2024 mencakup fase sebelum pandemi, masa krisis, dan pemulihan, sehingga memberikan dasar yang memadai untuk analisis dinamika efisiensi anggaran. Dampak pandemi COVID-19 pada periode 2019-2024 belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya, meskipun sektor pariwisata mengalami perubahan signifikan pada anggaran dan kinerja. Pemerintah daerah membutuhkan analisis efisiensi terkini berbasis kinerja untuk mendukung pengelolaan anggaran yang tepat dan penguatan infrastruktur pariwisata di masa pemulihan. Kesenjangan ini menunjukkan efektivitas anggaran selalu tidak sejalan dengan efisiensi, sementara skala operasi dan pengelolaan input

output berperan penting dalam kinerja keuangan daerah. Penelitian yang menilai efisiensi realisasi belanja modal pariwisata dengan metode DEA pada periode terbaru belum ada. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan metodologis dan kontekstual serta menyediakan bukti empiris bagi peningkatan pengelolaan anggaran pariwisata secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi realisasi anggaran belanja modal pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul periode 2019-2024.

## **LANDASAN TEORI**

Dasar teori dalam penelitian ini mencakup konsep yang saling berkaitan untuk menjelaskan efisiensi pengelolaan anggaran pariwisata. Teori keuangan publik merupakan ilmu ekonomi yang mempelajari tentang tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola keuangan yang digunakan untuk mengatur alokasi sumber daya terutama fasilitas pelayanan publik, distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi. Dalam sektor pariwisata alokasi sumber daya yang tepat sasaran akan memberikan dampak dalam program pembangunan yang berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi dan mendorong pertumbuhan pariwisata yang efisien, efektif, dan adil (Mardiasmo, 2018). Teori ini ditegaskan oleh Lulaj et al (2024) praktik pengelolaan keuangan public secara transparan, alokasi sumber daya yang penting untuk mewujudkan pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan.

Efisiensi dalam sektor pariwisata merupakan kemampuan pemerintah dalam menghasilkan output yang maksimum dengan pemakaian input seminim mungkin, sehingga sumber daya yang dikelola secara optimal dapat memberikan manfaat pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, lama tinggal rata-rata dan tingkat hunian hotel. Selain itu, upaya dalam Pembangunan infrastruktur, promosi destinasi, dan penyediaan fasilitas yang mendukung sarana dan prasarana juga memberikan dampak pada perekonomian daerah salah satunya perluasan lapangan kerja. Konsep ini memberikan kerangka dalam menganalisis dan evaluasi kinerja Dinas Pariwisata Bantul untuk memanfaatkan belanja modal dan kegiatan fisik meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Ariani et al., 2024).

Metode DEA menjadi alat pengukuran utama dengan model CCR yang mengasumsikan skala tetap untuk membandingkan efisiensi antar periode secara konsisten dalam pengelolaan anggaran pariwisata. Studi ini diperkuat oleh Ahmad (2022) bahwa investasi pariwisata yang efisien memberikan manfaat dalam peningkatan daya saing destinasi wisata ditingkat global, sehingga konsep efisiensi dan metode DEA menjadi dasar pemikiran penelitian untuk menilai hubungan antara alokasi dan realisasi belanja modal, jumlah kegiatan fisik pariwisata dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Alokasi belanja modal merupakan proses strategis yang digunakan dalam menentukan dan mendistribusikan dana pemerintah daerah untuk memperoleh dan mengembangkan aset tetap yang memiliki nilai manfaat jangka Panjang (Made &

# Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Modal Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2019-2024 Menggunakan Metode *Data Envelopment Analysis* (DEA)

Rahyuda, 2018). Alokasi ini berupa Pembangunan fasilitas pendukung seperti jalur akses pariwisata, area wisata atau sarana akomodasi untuk meningkatkan daya tarik wisata. Proses ini tidak dapat dilakukan secara sembarangan tetapi melalui prosedur dan mempertimbangkan berbagai faktor seperti visi misi Pembangunan daerah, kebutuhan infrastruktur, serta ketersediaan sumber daya fiskal untuk menentukan alokasi pendanaan (Rosita, 2020). Selain itu, regulasi pemerintah seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 yang menjadi acuan utama bahwa alokasi selaras dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan prioritas nasional, sehingga meminimalisir terjadinya penyimpangan yang menghambat tujuan jangka panjang. Sementara itu, realisasi belanja modal merepresentasikan proses eksekusi dari rencana anggaran yang telah dialokasikan, efektivitas pelaksanaan menjadi ukuran keberhasilan pengelolaan keuangan daerah. Realisasi ini mencakup kegiatan seperti pengadaan barang, konstruksi, atau pemeliharaan aset yang perlu diawasi secara ketat untuk mencegah ketidakefisienan. Dengan demikian, realisasi belanja modal bukan hanya pengeluaran dana melainkan instrumen untuk mewujudkan nilai tambah bagi Masyarakat, khususnya dalam peningkatan kualitas layanan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal (Rosita, 2020).

Jumlah kegiatan fisik wisata merupakan jembatan yang penting antara sumber daya input anggaran dengan dampak ekonomi yang lebih luas sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Kegiatan ini meliputi Pembangunan fisik seperti renovasi objek wisata, peningkatan fasilitas pendukung salah satunya infrastruktur yang secara langsung mempengaruhi pengalaman pengunjung dan volume aktivitas wisata (Suprayitno, 2020). Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indicator output primer yang mencerminkan peran sektor pariwisata dalam memperkuat fisik fiskal daerah. PAD ini bersumber dari retribusi wisata, pajak hiburan dan kontribusi ekonomi yang terkait, dan didorong oleh *multiplier effect* dari investasi wisata berupa peningkatan pendapatan Masyarakat lokal melalui sektor salah satunya kuliner dan kerajinan. Konsep ini menegaskan bahwa pengelolaan belanja modal yang efisien tidak hanya memberikan hasil aset tangible, tetapi memperkuat siklus ekonomi berkelanjutan ditingkat daerah (Mardiasmo, 2011 & Astuti, 2019).

Kerangka konseptual ini mengilustrasikan interaksi antara variabel input (alokasi belanja modal, realisasi belanja modal, dan jumlah kegiatan fisik wisata) dengan output PAD dalam kerangka efisiensi. Berdasarkan teori keuangan public dan efisiensi melalui pendekatan DEA periode 2019-2024 untuk menangkap dinamika pandemi, krisis, dan pemulihan sehingga dapat dibangun hipotesis dari integrasi teori dan empiris adalah:

- H1 : Alokasi belanja modal memiliki dampak positif terhadap efisiensi PAD
- H2 : Realisasi belanja modal memiliki dampak positif terhadap efisiensi PAD
- H3 : Jumlah kegiatan fisik wisata memiliki dampak positif terhadap efisiensi PAD

Kerangka ini tidak hanya menyediakan panduan metodologis tetapi memberikan kontribusi praktis bagi kebijakan pariwisata berkelanjutan ditingkat daerah.

## METODE

Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan pendekatan deskriptif analitik berfokus pada pengukuran efisiensi secara relatif melalui proses data numerik tanpa melibatkan manipulasi variabel eksperimental. Selain itu, pendekatan ini mampu menjelaskan fenomena ekonomi berdasarkan data empiris yang diolah secara objektif dan terukur (Kuncoro, 2013 & Sugiyono, 2019). Analisis ini difokuskan pada perbandingan input dan output tanpa memerlukan sampel populasi yang luas, sehingga validitas penggunaan data historik dapat diverifikasi, sementara reliabilitas diperkuat dengan metode analisis non parametrik yang tidak bergantung pada asumsi distribusi data normal, sehingga mengurangi hasil penyimpangan secara subjektif dan meningkatkan reproduktibilitas hasil.

Sumber data yang digunakan bersifat sekunder, diperoleh dari dokumen resmi dan laporan keuangan yang tersedia secara publik. Data meliputi alokasi dan realisasi belanja modal, jumlah kegiatan fisik wisata, serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor wisata ([data.bantulkab.go.id](http://data.bantulkab.go.id)) dan laporan keuangan yang diperoleh dari Bappeda Kabupaten Bantul dan dokumen laporan keuangan daerah yang relevan. Periode 2019-2024 dipilih untuk merepresentasikan analisis tren dan mencakup fase sebelum pandemi, krisis dan pemulihan pada masa COVID 19.

Teknik analisis data menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) dengan model Charnes, Cooper, Rhodes (CCR) yang mengasumsikan *Constant Returns to scale* (CRS). Efisiensi diukur melalui perbandingan relatif antar unit keputusan (DMU) selama periode 2019-2024. Dalam penelitian ini, setiap tahun pengamatan (2019-2024) diperlakukan sebagai *Decision Making Unit* (DMU) sehingga efisiensi diukur melalui perbandingan relatif antarperiode waktu. Pemilihan model CCR dilakukan karena penelitian berfokus pada evaluasi efisiensi teknis secara agregat, dengan asumsi perubahan input berpengaruh proporsional terhadap output. Model ini dinilai lebih sesuai untuk menilai kinerja pengelolaan anggaran publik yang berada dalam kendali satu instansi dan satu skala kebijakan, dibandingkan model *Variable Returns to Scale* (VRS) yang lebih menekankan pada skala operasi.

Analisis bersifat non parametrik, sehingga tidak perlu asumsi fungsi produksi spesifik dan dapat dilakukan menggunakan perangkat lunak seperti DEAP 2.1 untuk menghitung skor efisiensi berkisar antara 0 hingga 1, skor 1 menandakan efisiensi penuh. Proses analisis dimulai dengan variabel yang dipilih, dilanjutkan dengan penghitungan frontier efisiensi dan diakhiri dengan identifikasi sumber inefisiensi seperti slack input dan output. Variabel diukur dengan definisi operasional yang jelas untuk memastikan ketepatan pengukuran.

*Tabel 1 Definisi Operasional Variabel*

No	Variabel Input	Kriteria
----	----------------	----------

## Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Modal Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2019-2024 Menggunakan Metode *Data Envelopment Analysis (DEA)*

1.	Alokasi Belanja Modal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai realisasi belanja modal (rupiah).</li> <li>2. Proposal belanja modal (persen).</li> <li>3. Distribusi belanja (aset tetap seperti tanah, bangunan, jalan, irigasi dan jaringan).</li> <li>4. Pertumbuhan belanja modal setiap tahun.</li> </ol>
2.	Realisasi Belanja Modal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rasio realisasi belanja modal dengan kategori minimal 80% untuk efisiensi anggaran</li> <li>2. Rasio biaya unit per output setiap pembangunan infrastruktur.</li> <li>3. Efisiensi penggunaan dana untuk biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh sehingga biaya proporsional lebih rendah.</li> </ol>
3.	Jumlah Kegiatan Fisik Wisata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah proyek fisik yang selesai setiap tahun minimal 5-10 proyek Pembangunan atau rehabilitasi fasilitas wisata per kabupaten/kota.</li> <li>2. Target kegiatan fisik terhadap rencana kerja daerah &gt;80% dari target tahunan</li> <li>3. Rasio kegiatan fisik terhadap anggaran yaitu perbandingan antara jumlah proyek dengan total realisasi belanja modal dengan rasio efisiensi berkisar antara 0 hingga 1, skor 1 menunjukkan pengelolaan yang baik dan optimal.</li> </ol>

Sumber : Dolah peneliti, 2025

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Hasil

Hasil uji hipotesis I menyatakan alokasi belanja modal berpengaruh positif terhadap efisiensi PAD. Hasil hipotesis menunjukkan efisiensi PAD terjadi pada tahun 2019, 2020, dan 2023. Sementara itu, pada tahun 2021 dan 2024 hipotesis tersebut ditolak karena proporsi alokasi yang berlebih justru menurunkan efisiensi. Hasil ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahzalena & Juliansyah (2019) dengan model CRS, kelebihan modal menjadi salah satu sebab utama ketidakefisienan secara teknis.

Hasil uji hipotesis II memberikan pernyataan bahwa realisasi belanja modal berpengaruh positif terhadap hasil yang diterima secara parsial, realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 sampai 2023 mendukung efisiensi secara penuh sedangkan pada tahun 2021 terjadi slack realisasi mencapai puluhan miliar hal ini menunjukkan bahwa realisasi besar tidak secara otomatis meningkatkan efisiensi jika hasil output rendah. Hal ini sejalan dengan temuan yang dilakukan oleh Raditya & Arianti (2023) memberikan gagasan bahwa anggaran yang optimal harus selaras dengan indikator capaian kinerja diperlukan adanya penyesuaian perencanaan untuk memaksimalkan *multiplier effect* pada perekonomian tanpa pemborosan.

Hasil uji hipotesis III pada variabel jumlah kegiatan fisik wisata berpengaruh positif yaitu menunjukkan hasil yang diterima secara parsial. Pada tahun 2023 memiliki 11 kegiatan sehingga mendapatkan hasil efisiensi yang sempurna sedangkan tahun 2024 adanya 12 kegiatan wisata tidak memiliki pengaruh yang sama dan justru harus dikurangi 6 unit. Hal ini membuktikan bahwa kuantitas kegiatan tidak selalu selinear dengan efisiensi kualitas dan dampak kegiatan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Dewi, 2022).

*Tabel 2 Hasil Input Slack*

	Input 1 (alokasi belanja modal)	Input 2 (realisasi belanja modal)	Input 3 (jumlah kegiatan fisik wisata)
DMU 2019	0	0	0
DMU 2020	35203106,01	0	2.003
DMU 2021	0	69087237.797	0
DMU 2022	0	0	0
DMU 2023	0	0	0
DMU 2024	0	0	0

Sumber: data diolah Peneliti, 2025

Hasil perhitungan dalam tabel tersebut merepresentasikan slack variabel input terjadi pada tahun 2020. Alokasi belanja modal sebesar Rp 35.203.106,01 dan jumlah kegiatan fisik wisata 2 unit, selanjutnya pada tahun 2021 kembali terjadi slack variabel input realisasi belanja modal Rp 69.087.237.797. Temuan ini mengindikasikan adanya kelebihan realisasi anggaran yang belum sepenuhnya dikonversi menjadi peningkatan kinerja sektor pariwisata. Sementara itu, pada tahun periode pengamatan 2019, 2022, 2023 dan 2024 tidak ditemukan nilai input slack. Hal ini mengindikasikan alokasi belanja modal, realisasi anggaran dan jumlah fisik wisata pada tahun tersebut berada ditingkat efisien secara teknis sesuai dengan frontier DEA. Dengan demikian, sumber utama inefisiensi anggaran belanja modal Dinas Pariwisata disebabkan kelebihan penggunaan input pada periode tertentu, dibandingkan oleh ketidaktepatan pencapaian output.

Tabel 3 Hasil Output Variabel PAD

DMU Tahun	PAD Pariwisata Aktual	Target Output	Output Slack	Keterangan
2019	31.756.578.250	31.756.578.250	0	Efisien
2020	16.954.700.250	16.954.700.250	0	Inefisien (input excess)
2021	13.385.022.250	13.385.022.250	0	Inefisien (input excess)
2022	57.267.511.559	57.267.511.559	0	Efisien
2023	70.512.345.670	70.512.345.670	0	Efisien
2024	30.667.876.500	30.667.876.500	0	Inefisien (input excess)

Sumber: Data diolah Peneliti, 2025

Hasil analisis berdasarkan table diatas menunjukkan bahwa seluruh nilai target output sama persis dengan output aktual dan output slack pada semua DMU. Temuan ini merepresentasikan inefisiensi teknis pada tahun 2020, 2021 dan 2024 bersifat murni karena pengelolaan yang kurang baik, bukan karena skala operasi dari kinerja output, sehingga dapat diartikan pemerintah daerah telah berhasil menjaga tingkat PAD Pariwisata sesuai dengan proporsi terbaik yang sudah dicapai pada tingkat input masing-masing. Namun masih menggunakan beberapa sumber daya seperti anggaran dan kegiatan secara berlebihan.

# Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Modal Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2019-2024 Menggunakan Metode *Data Envelopment Analysis (DEA)*

Temuan ini membuat peneliti menyimpulkan bahwa setelah dilakukan uji hipotesis hasil analisa melalui DEAP 2.1 menunjukkan skor efisiensi penuh (skor 1,000) tercapai pada tahun 2019, 2022 dan 2023. Sementara itu, tahun 2020 (0,851), tahun 2021 (0,442) dan tahun 2024 (0,473) masih tidak efisien. Penurunan ini secara tajam terjadi murni disebabkan oleh kelebihan alokasi dan realisasi belanja modal yang tidak seimbang dengan capaian PAD.

## **Pembahasan**

Hasil analisis penelitian yang menggunakan perangkat lunak DEAP 2.1 menggunakan model CCR menunjukkan efisiensi realisasi belanja modal Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul mengalami fluktuasi yang tajam selama periode 2019-2024. Variasi tingkat efisiensi tersebut mencerminkan perbedaan kemampuan dalam mengelola input anggaran untuk menghasilkan output PAD sektor pariwisata pada setiap tahun pengamatan. Penurunan efisiensi yang terjadi pada periode pandemi menunjukkan bahwa peningkatan alokasi dan realisasi belanja modal tidak secara otomatis diikuti oleh peningkatan kinerja output. Analisis slack mengidentifikasi adanya kelebihan input, terutama pada komponen belanja modal dan kegiatan fisik wisata yang belum sepenuhnya dikonversi untuk peningkatan PAD. Kondisi ini menggambarkan bahwa situasi krisis, proses transformasi anggaran menjadi output kinerja menghadapi keterbatasan structural dan operasional, sehingga diperlukan penyesuaian perencanaan agar anggaran benar-benar memberikan *multiplier effect* positif pada perekonomian daerah tanpa menimbulkan pemborosan.

Hasil empiris menunjukkan bahwa jumlah kegiatan fisik wisata tidak selalu memiliki hubungan linier dengan efisiensi. Pada tahun 2024 jumlah kegiatan fisik wisata yang relatif tinggi, efisiensi justru menurun yang mengindikasikan bahwa kualitas dan dampak kegiatan lebih menentukan daripada kuantitas. Sebaliknya pada periode pemulihan pasca pandemi, peningkatan efisiensi cenderung terjadi ketika pemerintah daerah lebih memfokuskan anggaran pada kegiatan prioritas yang mendukung peningkatan aksesibilitas dan kualitas fasilitas pada destinasi wisata utama.

Keberhasilan kinerja Pariwisata Kabupaten Bantul tidak hanya dipengaruhi oleh total besar anggaran yang dialokasikan, tetapi lebih pada efektivitas distribusi anggaran dan kesesuaian dengan program kebutuhan pembangunan destinasi wisata selain itu temuan ini selaras dengan prinsip DEA bahwa DMU (*Decision Making Unit*) yang tidak berada pada garis efisiensi memiliki potensi pengurangan input secara proporsional tanpa mengurangi output.

Temuan empiris ini sejalan dengan teori keuangan publik Mardiasmo (2018). Variasi efisiensi dapat dijelaskan melalui ketiga fungsi anggaran publik:

1. Fungsi alokasi

Tahun 2019, 2022 dan 2023 menunjukkan keberhasilan fungsi alokasi yang optimal. Meskipun besaran anggaran lebih variatif, dana yang diterima dapat dialokasikan secara tepat sasaran pada destinasi wisata prioritas dan kegiatan fisik wisata yang memang dibutuhkan Masyarakat dan wisatawan. Sementara

itu, tahun 2021 dan 2024 mencerminkan kegagalan akibat refocusing anggaran dan over budgeting yang tidak realistis.

2. Fungsi distribusi

Rendahnya PAD pada tahun inefisien menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk mendistribusikan manfaat ekonomi pariwisata secara merata salah satunya UMKM, pokdarwis dan Masyarakat lokal sehingga memperlemah efek distribusi pendapatan yang seharusnya menjadi salah satu kebijakan fiskal daerah terutama pada tahun 2021.

3. Fungsi stabilisasi

Terjadinya inefisiensi pada masa pandemi dan pasca pandemi menunjukkan kerentanan sektor pariwisata terhadap guncangan eksternal. Ketidakmampuan menjaga stabilitas kontribusi PAD mengindikasikan lemahnya fungsi stabilitas, akibatnya ketergantungan yang tinggi pada belanja modal tanpa mekanisme pengaman atau perencanaan berbasis kinerja. Temuan ini sejalan dengan teori efisiensi alokatif yang dikemukakan Varian (1992) distribusi sumber daya yang tepat sasaran dapat menghasilkan output yang maksimal dengan input yang sama. ditingkat Kabupaten, sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambil keputusan untuk merancang strategi yang lebih adaptif misalnya penguatan monitoring slack dan prioritas kegiatan fisik wisata yang berkualitas tinggi.

Berdasarkan temuan empiris dan teoritis, implikasi kebijakan penelitian ini menekankan pentingnya pengelolaan belanja modal pariwisata yang berorientasi pada keseimbangan hasil input dan output. Pemerintah daerah perlu memperkuat mekanisme pengendalian slack input melalui perencanaan anggaran berbasis kinerja, evaluasi berkala terhadap efektivitas kegiatan fisik wisata dan penetapan prioritas program terhadap peningkatan PAD. Selain itu, strategi pengembangan pariwisata pasca pandemi perlu diarahkan pada peningkatan kualitas dan keberlanjutan kegiatan fisik wisata, bukan semata pada peningkatan jumlah kegiatan. Dengan demikian pendekatan pengelolaan belanja modal tidak hanya meningkatkan tingkat serapan anggaran, tetapi juga mampu memperkuat efisiensi teknis dan keberlanjutan kinerja sektor pariwisata daerah.

Tabel 1. Skor Efisiensi

No	DMU Tahun	Skor Efisiensi	Status Efisiensi
1	DMU 2019	1,000	Efisien
2	DMU 2020	0,851	Inefisien
3	DMU 2021	0,442	Inefisien
4	DMU 2022	1,000	Efisien
5	DMU 2023	1,000	Efisien
6	DMU 2024	0,473	Inefisien

Sumber: Data diolah Peneliti, 2025

# Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Modal Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2019-2024 Menggunakan Metode *Data Envelopment Analysis* (DEA)

## **SIMPULAN**

Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa efisiensi realisasi anggaran belanja modal pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul mengalami penurunan signifikan selama masa pandemi, namun mulai pulih secara bertahap pada periode pasca pandemi. Pencapaian efisiensi ditentukan oleh keseimbangan antara alokasi, realisasi dan kegiatan fisik wisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata. Temuan ini menegaskan bahwa pencapaian efisiensi anggaran tidak bergantung pada besarnya anggaran yang dialokasikan, melainkan pada ketepatan perencanaan program, kualitas pelaksanaan, serta kemampuan mengonversi input anggaran menjadi output kinerja pariwisata yang optimal.

Implikasi kebijakan dari penelitian menunjukkan pentingnya pengelolaan anggaran yang lebih adaptif dan terintegrasi, khususnya dalam kondisi pemulihan pasca krisis. Pemerintah daerah disarankan untuk menerapkan mekanisme pengendalian slack anggaran melalui (1) penguatan perencanaan berbasis kinerja dan target output yang terukur, (2) evaluasi periodik terhadap kesesuaian antara alokasi dan realisasi belanja modal, dan capaian PAD, (3) serta penyesuaian jenis kegiatan fisik wisata berdasarkan prioritas dan efektivitas hasil. Dengan demikian, peningkatan fungsi monitoring dan pengawasan internal perlu diarahkan pada efektivitas pelaksanaan program, bukan hanya pada tingkat serapan anggaran.

Berdasarkan kemampuan tersebut secara teoritis penelitian ini memperluas pemahaman tentang penerapan DEA dalam evaluasi efisiensi keuangan publik disektor pariwisata terutama pada masa transisi pasca krisis pandemi dan mengisi celah pengetahuan mengenai dinamika inefisiensi anggaran ditingkat daerah. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek wisata dengan membandingkan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul dalam satu analisis DEA. Selain itu, mempertimbangkan metode DEA model VRS untuk menangkap perbedaan skala operasi dan menghasilkan analisis yang lebih lengkap dan mendalam.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang konstruktif selama proses penyusunan dan pelaksanaan penelitian ini. Kontribusi tersebut sangat berperan dalam meningkatkan kualitas analisis, ketepatan metodologi, dan penyempurnaan penulisan naskah. Penelitian ini murni dilaksanakan oleh penulis dengan tujuan tugas akhir serta tidak didanai oleh lembaga pendanaan manapun sehingga dilaksanakan secara mandiri oleh penulis.

## REFERENSI

- Abdul Halim. (2016). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ahmad, U. S. (2022). Implementasi Pariwisata terhadap Perekonomian Indonesia. *AL-DYAS*, 1(1), 81–96. <https://doi.org/10.58578/aldyas.v1i1.1319>
- Ariani, Dewi (2024). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, PDRB, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2017-2022*. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.
- Bappeda Kabupaten Bantul. (2024). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029*
- Datulinggi, O., Anwar, A. I., & Sobarsyah, M. (2021). *Analysis of Retribution Revenue in the Tourism Sector and Its Contribution to the Original Revenue of North Toraja District*. 9(6), 1–9.
- Desdiani, N. A., Sabrina, S., Husna, M., Budiman, A. C., Afifi, F. A. R., & Halimatussadiyah, A. (2022). *Local Budget Resilience in Times of COVID-19 Crisis: Evidence from Indonesia*. *Economies*, 10(5). <https://doi.org/10.3390/economies10050108>
- [https://bantulkab.go.id/data\\_pokok/index/0000000028/data-umum.html](https://bantulkab.go.id/data_pokok/index/0000000028/data-umum.html)
- Kuncoro, M. (2013). *Metode riset untuk bisnis & ekonomi* (4th ed.). Erlangga.
- Laoli, M. I., Ndraha, A. B., & Telaumbanua, Y. (2022). Implementasi SIPD Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintah Kabupaten Nias (Studi Kasus BPKPD Sebagai Leading Sektor Penganggaran). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 10(4), 1381–1389.
- Lulaj, E., Lima Santos, L., Gomes, C. F., & Jha, A. K. (2024). *The quintessence of public finances: Sustainability dynamics in tourism financial analysis*. *Journal of Tourism and Services*, 29(1), 75–92.
- Mahmudi. (2019). *Buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit STIM YPKN
- Made, N., Indiyanti, D., & Rahyuda, H. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Di Provinsi Bali. 7(9), 4713–4746. <https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2018.v7.i09.p4>
- Mahzalena, Yusra dan Hijri Juliansyah. (2019). Pengaruh Inflasi, Pengeluaran Pemerintah dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, Vol. 2, No. 1
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan, Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*, Andi: Yogyakarta
- Paskalia, M., Vina, D., Herdi, H., & Aurelia, P. N. (2023). *SSCJ+Vol.+1,+No.+5,+September+2023+hal+463-476.uh.\_compressed*. 1(5).

**Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Modal Pada Dinas  
Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2019-2024  
Menggunakan Metode *Data Envelopment  
Analysis (DEA)***

- Putri, I. G. N. A., & Dewi, N. K. (2022). *Efisiensi Alokasi Anggaran Sektor Pariwisata Daerah Menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 8(2), 112–130.
- Radityo, M. I., & Arianti, F. (2023). Analisis Efisiensi Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Sektor Kesehatan Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2020. *BISECER (Business Economic Entrepreneurship)*6(2),57. <https://doi.org/10.61689/bisecer.v6i2.442>
- Rosita, Rosita. (2020). Penerapan Algoritma Dijkstra Terhadap Objek Wisata Lembah Hijau Di Bandar Lampung Berbasis Android. *Skripsi Thesis*, Institut Informatika & Bisnis Darmajaya
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suprayitno, Suprayitno. (2020). Peran Sektor Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kotawaringin Barat
- Varian. (1992). *Microeconomic Analysis .Third Edition*, New York: Norton.